
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

Latifah Wan Azizah

Universitas Bangka Belitung

Email: latifahwanazizah05@gmail.com

Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Sandy Pratama

Universitas Bangka Belitung

Email: sandy-pratama@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis representasi politik perempuan di DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2024 serta faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif**, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pangkalpinang belum mencapai ambang batas 30% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dari 30 kursi yang tersedia, hanya **empat kursi (13,3%)** yang diduduki oleh perempuan. Rendahnya angka ini berdampak langsung pada minimnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan perempuan. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya rasa percaya diri, terbatasnya jaringan eksternal pendukung, serta kekhawatiran terhadap dinamika politik dan sistem pemilu. Kehadiran perempuan di legislatif sangat krusial untuk menjamin pengambilan keputusan yang adil, inklusif, dan responsif gender.

Kata Kunci: Partisipasi, Representasi, DPRD Kota Pangkalpinang

Abstract

This study focuses on women who are legislative members of Pangkalpinang's Regional House of Representatives, later called DPRD, particularly on their representation and roles in performing legislative duties. The purpose of this study is to evaluate the feasibility of achieving women's political representation in the Pangkalpinang's DPRD.

The following is a full description of the issues that serve as the foundation for this study: 1) How is the 2024 Pangkalpinang's Regional House of Representatives procedure for women's political representation going? 2) What are the obstacles that hinder women's political representation in the Regional House of Representatives in Pangkalpinang? A qualitative descriptive research method was the methodology employed in this study. In-depth interviews, observations, and documentation were used as data collection methods.

Additionally, the collected data underwent multiple stages of analysis, including data presentation, data condensation, and conclusion or verification drawing.

It can be inferred from the findings of the research that women's representation in the Pangkalpinang's DPRD in 2024 has yet to meet the 30% minimum requirement set forth in Law Number 12 of 2003. Of the thirty legislative seats available, women only hold four of them. The few policies that are focused on women's concerns are impacted by this underrepresentation. One strategy to empower women, support them in overcoming obstacles, and improve their quality of life is to share information and experience. For equitable and inclusive representation in decision-making, women's participation in DPRD is crucial. The low representation of women is caused by a number of factors, such as a lack of confidence in one's ability to participate in politics, a lack of external networks that can encourage women to do so, and specific anxieties or worries about elections and political dynamics that women still do not fully comprehend.

Keywords: *Participation, Representation, Pangkalpinang's Regional House of Representatives.*

PENDAHULUAN

Pada era saat ini, generasi milenial menunjukkan kecenderungan di mana banyak perempuan yang berhasil menempati posisi kepemimpinan, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, maupun sektor-sektor lainnya. Perempuan memiliki urgensi untuk menampilkan eksistensi mereka di hadapan masyarakat guna membuktikan bahwa mereka pun mampu menjadi pemimpin serta melaksanakan tugas yang selama ini dikategorikan sebagai “pekerjaan laki-laki”. Fenomena semacam ini masih belum dapat dikategorikan sebagai bentuk kesetaraan gender yang sejati. Masih terdapat laki-laki maupun kelompok masyarakat yang mempertahankan pandangan bahwa perempuan ialah entitas yang memiliki posisi sekunder setelah laki-laki, sehingga opini mereka kerap kali diremehkan atau bahkan diabaikan.

Dalam berbagai negara, hambatan masih dihadapi oleh perempuan dalam upaya memperoleh kedudukan politik yang setara dengan laki-laki. Ketimpangan gender dalam ranah politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya ialah persepsi masyarakat yang dibatasi oleh stereotip gender terhadap kapabilitas perempuan dalam kepemimpinan politik, sistem politik yang belum sepenuhnya inklusif, serta ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi maupun politik. (Annisa 2022).

Keterlibatan kaum perempuan dalam sektor politik masih dihadapkan pada berbagai kendala, disebabkan oleh budaya patriarki yang membatasi akses mereka

dalam memasuki dunia politik, khususnya dalam institusi legislatif, serta minimnya edukasi mengenai politik. Terdapat kecenderungan bahwa di negara-negara berkembang, partisipasi politik perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai konsekuensi, mereka lebih banyak terlibat dalam aspek-aspek yang sebelumnya memang lebih diprioritaskan, yakni urusan rumah tangga.

Kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam dunia politik terbuka secara luas serta telah memperoleh perhatian dari pemerintah Indonesia. Dalam rangka mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, serta berhubungan dengan peningkatan peran perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai serta di lembaga DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota meningkat menjadi 30%. Adanya Undang-Undang tersebut mendorong lahirnya berbagai strategi dan langkah dalam rangka meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan identitas serta kepentingan dalam hasil pemilu yang mencerminkan pengalaman politik perempuan. Akan tetapi, pada periode keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2029, hanya terdapat empat anggota perempuan, atau kurang dari 30% dari total keseluruhan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang berjumlah 30 orang.

Penelitian terkait representasi politik perempuan di DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2024 menjadi topik yang menarik untuk dianalisis, mengingat beberapa alasan utama. Pertama, penelitian ini berkaitan dengan proses keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan bagaimana dinamika perwakilannya terbentuk. Kedua, rendahnya tingkat representasi perempuan dalam DPRD Kota Pangkalpinang menjadikan pembahasan ini semakin relevan, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang berkontribusi terhadap minimnya partisipasi perempuan dalam dunia politik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1999), prosedur dalam penelitian kualitatif berorientasi pada pengumpulan data deskriptif, baik dalam bentuk

tulisan maupun lisan, yang bersumber dari individu, tindakan, serta perilaku variabel yang diamati. Rahman dan Ibrahim (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan penyajian data secara kualitas yang tidak terdiri dari angka-angka dengan bersifat lebih eksploratif terhadap data serta bukan pengujian terhadap variable.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024.

Target/Subjek Penelitian

Setiap penelitian kualitatif wajib hukumnya punya informan. Informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian ini dalam kata lain informan ini adalah sebagai subjek dari penelitian. Adapun klasifikasi informan adalah, informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pemilihan informan dengan teknik *snowball sampling*, yang telah ditentukan terlebih dahulu identifikasinya. Tahapan untuk memperoleh informan dengan teknik ini yaitu cukup di awal peneliti menentukan dua atau tiga informan saja. Kemudian dari informan tersebut akan diperoleh mengenai informan informan selanjutnya yang nantinya lebih memahami seluk-beluk permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Jumlah informan tidak dibatasi berdasarkan kuantitas melainkan berdasarkan pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan telah menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti akan menghentikan proses pencarian informasi dan informan.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau yang berasal dari tangan pertama dan data primer ini biasanya adalah data yang diperoleh dari

responden melalui, kelompok fokus dan data hasil wawancara peneliti dengan informan tergantung teknik pengumpulan data yang digunakan (Nurdin, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber informasi yang diperoleh melalui aktivitas membaca, menganalisis, serta memahami berbagai referensi atau media lain, yang dapat berupa buku, literatur, maupun dokumen. Data sekunder berfungsi sebagai elemen penunjang dalam suatu penelitian. (Sugiyono, 2012).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah teknik pengumpulan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan pertanyaan pertanyaan tersebut akan ditujukan pada informan kunci dan informan biasa. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Instrumen (pedoman wawancara) tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait judul penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa gambar realitas keseharian masyarakat yang diteliti. Kemudian dokumentasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip yang terkait dengan judul penelitian ini nantinya. Arsip-arsip bisa berupa berita koran, gambar, surat-surat, tulisan ilmiah berita online, atau dokumen lain yang nantinya membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model *interactive analysis* yang telah dipresentasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan pra penelitian guna membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini. Proses ini terjadi saat pembuatan proposal penelitian hingga penelitian nantinya penelitian selesai.

2. Penyajian Data

Display data (penyajian data). Dalam penyajian data ini akan ditampilkan informasi yang tersusun dan terstruktur, sehingga diperoleh kesimpulan dan strategi untuk resolusi konflik agraria.

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi atas data yang diperoleh lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Representasi Perwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Representasi politik merupakan hasil dari hubungan serta interaksi timbal balik yang terjadi dalam rentang waktu tertentu antara para politikus dan konstituen, sehingga membentuk keterikatan yang tidak sekadar bergantung pada hubungan yang bersifat formalistik.

Dalam hal ini legislator perempuan menjalankan berbagai peran dan fungsi representasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang diantaranya adalah:

1) *Descriptive Representation atau Standing For*

Merupakan suatu hubungan objektif yang dimiliki oleh para wakil terhadap orang-orang yang diwakilinya. Dalam hal ini, seorang wakil memiliki sebuah kesamaan identitas, budaya, ide serta tindakan yang dimilikinya dengan orang yang sedang diwakilinya.

Upaya yang dilakukan meliputi penyelenggaraan pelatihan keterampilan guna membantu perempuan memperoleh kemampuan yang tepat dan kompetitif, program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian finansial, serta advokasi untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Keterlibatan dalam berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan di

aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Mendorong perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara finansial, seperti melalui program ekonomi kreatif yang melibatkan wanita. Dengan memberikan kekuatan kepada perempuan, tidak hanya meningkatkan kondisi hidup masing-masing individu, tetapi juga memperkuat basis keluarga dan komunitas. Aktif dalam memberikan pendidikan tentang isu-isu penting seperti pengasuhan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan tantangan lain yang dihadapi oleh perempuan. Menggunakan pengalaman pribadi dan pemahaman untuk membantu perempuan menghadapi masalah dan meningkatkan kualitas hidup.

Topik yang berkaitan dengan pengasuhan, pencegahan serta penanganan KDRT, dan isu-isu lain yang sering dihadapi perempuan menjadi bagian krusial dalam diskusi dan proses edukasi yang dilakukan. Mengedukasi orang lain melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman adalah salah satu metode untuk memberdayakan perempuan, membantu mereka menghadapi kesulitan, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Mempunyai keinginan kuat untuk membagikan pengalaman dan wawasan kepada perempuan lainnya agar mereka dapat meraih manfaat dan solusi dalam menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan. Memberdayakan perempuan untuk memperkuat keluarga dan lingkungan sekitar. Membangun pemahaman tentang hak-hak perempuan, cara mengenali tanda-tanda KDRT, metode mencari bantuan hukum atau psikologis, serta langkah-langkah pencegahan agar perempuan dapat hidup dengan lebih aman dan memiliki kekuatan.

Peran perempuan dalam dunia politik memiliki arti yang sangat strategis untuk menciptakan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Politik bukan hanya sekadar tempat untuk kekuasaan, melainkan juga urusan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan dan pengalaman unik. Dengan terlibatnya perempuan dalam lembaga politik dan pemerintahan, sudut pandang mereka bisa lebih baik diwakili dalam proses pembuatan kebijakan.

Peran perempuan di era modern ini sangat krusial. Dalam situasi kemajuan zaman, perempuan tidak boleh lagi dianggap lemah atau selalu berada di belakang laki-laki. Sudah saatnya perempuan memperoleh posisi setara dengan laki-laki di berbagai sektor, termasuk politik dan bisnis. Meski perempuan memiliki tugas

sebagai seorang ibu dan istri, hal itu tidak menjadi halangan untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa.

2) *Substantive Representation (Act For)*

Merupakan suatu bentuk representasi bertindak yang dapat menggambarkan seorang wakil yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan sebuah tindakan yang melekat dengan kepentingan kelompok masyarakat yang sedang mereka wakili.

Program yang dilaksanakan adalah pelatihan keterampilan yang ditujukan bagi perempuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka serta memperjuangkan pengurangan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang. Pelatihan ini dirancang untuk memberdayakan perempuan agar dapat mandiri secara finansial. Perempuan yang memiliki kekuatan dan kemampuan akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kami berupaya untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang sesuai, karena dua hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan serta masa depan perempuan. Kami berupaya untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang sesuai, karena dua hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan serta masa depan perempuan.

Program-program yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pemerintah kota dan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Aktivitas yang diadakan mirip dengan program pemerintah kota yang mengutamakan posyandu dan pendidikan. Aktivitas yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Pangkalpinang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan menjamin hak mereka melalui perlindungan hukum yang memadai. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara langsung dan nyata kepada masyarakat, termasuk perempuan.

Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lewat prosedur pemilihan, untuk menitikberatkan perhatian utama pada implementasi visi serta misi yang telah dipaparkan selama masa kampanye. Komitmen ini diwujudkan melalui tindakan konkret dalam memastikan setiap inisiatif dan kebijakan yang diusung dapat memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, terus berusaha untuk tetap terbuka terhadap aspirasi publik, serta berperan

aktif dalam beragam aktivitas masyarakat demi mempertahankan kedekatan dan membangun kepercayaan. Menjadi anggota DPRD bukan sekadar posisi, tetapi merupakan amanah yang membawa tanggung jawab besar, di antaranya menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks ini, terdapat kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan warga, khususnya yang berada di daerah pemilihan Pangkalbalam dan Tamansari. Dengan disertai niat tulus untuk melayani, setiap aspirasi dari masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku. Dengan tekad yang kuat dan integritas dalam menjalankan fungsi representasi, setiap harapan masyarakat dapat diwujudkan secara perlahan, terukur, dan tepat sasaran. Secara umum, saat ini terus membuka diri untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, mempelajarinya dengan seksama, dan menyalurkannya melalui prosedur yang sesuai, agar dapat diperjuangkan demi kepentingan bersama.

Melalui mekanisme penyerapan aspirasi, terus mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh warga menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan program kerja yang responsif, sehingga pemerintah dapat hadir dengan nyata untuk memberikan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

Faktor yang menghalangi kemajuan muncul karena masih kuatnya prasangka gender, yang dapat dipahami sebagai penilaian terhadap individu hanya berdasarkan asumsi mengenai kelompok di mana individu tersebut bernaung dalam masyarakat. Ada kekurangan kepercayaan dari publik terhadap perempuan, atau bisa juga dikatakan bahwa perempuan dipandang sebelah mata dalam ranah politik. Masyarakat cenderung lebih memercayai politisi laki-laki yang lebih mendominasi arena politik. Minimnya paparan menyebabkan masyarakat tidak mengenal calon perempuan dengan baik, sehingga mereka lebih memilih kandidat laki-laki yang lebih familiar. Perempuan sering dipandang kurang mampu sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, terutama

di bidang politik. Stereotip masyarakat ini menimbulkan ketidakadilan dalam representasi perempuan, sehingga semakin sulit untuk mengakui potensi perempuan.

Faktor penghambat keterwakilan mereka dalam DPRD dan dunia politik secara umum. Banyak perempuan merasa sulit untuk membagi waktu antara tanggung jawab keluarga dan dunia politik, sehingga ragu untuk terlibat lebih jauh. Kemudian Perempuan menganggap politik membutuhkan biaya besar, termasuk untuk kampanye dan sosialisasi. Banyak perempuan yang memiliki keterbatasan finansial dibandingkan laki-laki, terutama jika tidak memiliki dukungan dari jaringan ekonomi yang kuat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai “*Representasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024*”. Berdasarkan teori Representasi Hanna Pitkin Keterlibatan perempuan di DPRD sangat krusial dalam memastikan adanya representasi yang adil dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Perempuan membawa sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang beragam, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, responsif, dan peka terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang rentan. Selain itu, kehadiran mereka memperkuat demokrasi dan mendorong kesetaraan gender di ruang publik.

Anggota dewan perempuan di DPRD aktif mendorong dan mendukung program-program yang dirancang untuk pemberdayaan serta perlindungan perempuan. Program-program tersebut mencakup pengembangan ekonomi perempuan, peningkatan kesempatan pendidikan dan kesehatan, serta advokasi untuk kebijakan yang peka gender. Kehadiran mereka memastikan bahwa isu-isu yang dihadapi perempuan mendapatkan perhatian dalam proses legislasi dan penganggaran, yang pada akhirnya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor penghambat terjadi karena masih kuatnya stereotype gender yang dapat diartikan sebagai penilaian terhadap seseorang hanya atas anggapan terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikelompokkan di dalam masyarakat. Faktor penghambat lainnya juga terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan atau bisa disebut bahwa kaum perempuan dianggap rendah untuk

berpolitik, kemudian kurangnya kepercayaan diri kaum perempuan untuk mencalonkan diri dalam dunia politik. Tekanan sosial dapat membuat perempuan merasa tidak pantas atau ragu untuk terjun ke dunia politik. Kurangnya dukungan dari partai politik juga menjadi tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender bagi kader perempuan dalam politik.

Saran

Saran yang peneliti tuliskan untuk melakukan representasi politik Acting For secara merata di seluruh daerah pemilihan tidak hanya satu daerah dan bagi representasi Standing For sebaiknya terdapat sebuah pendampingan untuk kelompok perempuan tidak hanya sekedar mendengarkan dan merealisasikan undang-undang yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan.

Untuk meningkatkan representasi politik perempuan di DPRD Kota Pangkalpinang, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perubahan budaya yang lebih inklusif.

TENTANG PENULIS

Nama Latifah Wan Azizah, lahir di Jakarta, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Desember 2001. Alamat email penulis yaitu latifahwanazizah05@gmail.com Motto hidup penulis “Hiduplah dengan sabar, ikhlas, syukur, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki dkk. (2014). Dari representasi simbolik menuju representasi substantif. Yogyakarta: Institute For Reseach and Empowerment.
- Annisa, Syarifa. 2022. “Kuota Perempuan Dalam Politik Indonesia,” no. April.
- Ardiansa, Dirga. “Manghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia”. Jurnal Politik: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, Vol 2, No 1, Agustus (2016)
- Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Inside Book Center.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar–Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Chandoke, N. (2009). What is the Relationship Between Participation and Representation? Dalam Olle Törnquist, Neil Webster dan Kristian Stokke (eds). *Rethinking Popular Representation*. New York: Palgrave MacMillan.
- Djani, Luky, “Representsi Politik: Relasi Imaginer Konstituen atau Politikus”, *Jurnal Institute for Strategic Initiative* Vol. 12 No. 3. 10.
- Effendi, Prihatin, and Devi Ratnasari. “Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018)
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Gusmansyah, Weny. “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia”. *Jurnal Hawa*, Vol.1, No.1 (2019)
- Hidayanto, Muhammad & Yonatan H. Lopo, *Potret politik dan ekonomi lokal di Indonesia (Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan)*. Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta.
- Ihromi, TO. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imam Subono, Nur 2009. *Menuju Representasi Politik Perempuan Yang Lebih Bermakna*, *Jurnal Sosial Demokrasi* Edisi 6.
- Karmanis, “Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”, *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, VOL 1, No 22 (2022)
- Kurebwa, Jeffrey. 2014. “A Review of Hanna Pitkin’s (1967) Conception of Women’s Political Representation.” *International Journal of Scientific and Research Publications* 5 (11): 50. www.ijserp.org.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J, 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natasya, Ayu, Edriana Noerdin, dkk. *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Women Research Institute, (2014).
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartatie, 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept Of Representation*. Amerika : Cambridge University Press.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Kisi-kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.

- Rasyidin dan Aruni, F. (2016). GENDER DAN POLITIK; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rati, Atika, Fatmariza. “Hambatan Perempuan dalam Berpartisipasi terhadap Pembangunan Nagari,” Journal of Civic Education Vol.3, No.4 (2020)
- Saputra, Herdin Arie. “ Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019”, Jurnal Kajian Gender, Vol.12, No.1 (2020)
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sutaryono. 2015. "Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas Sd Gugus 5 Dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo".
- Yusuf, A. Muri, 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.